

# OPTIMALISASI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

Abd. Wahed

(STIT Al Ibrohimy Bangkalan)

## Abstrak:

Sejak era reformasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang pendidikan yaitu program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah sebagai jalur alternatif. Namun, dalam prosesnya mengalami berbagai persoalan sebagai sebuah dinamika. Selama ini, dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah dapat dikategorikan belum begitu efektif. Oleh sebab itu, program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah perlu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang optimal dan evaluasi yang benar dengan disertai manajemen integral yang koordinatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah. Di sisi lain, penelitian pustaka ini dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dan kajian epistemologis untuk pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, terutama di pondok pesantren salafiyah. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa dalam mengoptimalkan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah secara umum dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: *pertama*, dalam tataran pelaksanaannya yang menyangkut sasaran atau objek materil, kurikulum dan sistem evaluasinya. *Kedua*, hal yang menjadi penghambat, antara lain: jenjang, prosedur penyelenggaraan dan proses belajar mengajarnya.

**Kata Kunci:** Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pondok Pesantren Salafiyah

## A. Pendahuluan

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31, Pasal 5 dan Pasal 34 UU. RI. NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas bahwa tugas negaralah yang harus mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu siapa saja yang menjadi presiden di Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan konsekuensi yang cukup berat seperti saran pendidikan yang memenuhi standar, guru yang profesional dan seterusnya. Timbal balik dari hak yang diperoleh dalam hal pendidikan sebagai warga Negara juga mempunyai

kewajiban-kewajiban untuk menyukseskan pembangunan khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan.

Pondok pesantren, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah lahir di Indonesia, merupakan pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk asli budaya Indonesia yang indigenous. Pendidikan ini semula merupakan pendidikan agama Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat dan komunitas di nusantara pada abad ke-1. Selang beberapa abad berikutnya penyelenggaraan pendidikan ini semakin dinamis dan terature dengan munculnya tempat-tempat pengajian.<sup>1</sup>

Lembaga pesantren secara cepat dengan adanya sikap non-kooperativ ulama terhadap kebijakan *politik etis* pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Kebijakan ini bertujuan balas jasa kepada rakyat Indonesia dengan memberikan pendidikan modern, termasuk di dalamnya, budaya barat. Namun secara kualitas dan kuantitas kesempatan tersebut sangat terbatas. Sikap *silent opposition* para ulama itu kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pondok pesantren di daerah-daerah terpencil untuk menghindari intervensi Belanda serta member kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh pendidikan. Perkembangan pesantren yang begituy pesat juga ditengarai berkat dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 sehingga memungkinkan banyak pelajar Indonesia mengikuti pendidikan di Negara-nrgara timur tengah.<sup>2</sup>

Ciri umum yang dimiliki pondok pesantren adalah kultur yang khas yang berbeda dengan lembaga pendidikan dan komunitas lainnya. Perkembangan awal pesantren inilah yang menjadi cikal bakal dan tipologi unik lembaga pesantren yang berkembang hingga saat ini. Pada paruh abad ke-20 dapat diamati adanya dorongan deras dari pendidikan ala barat yang dikembangkan Belanda dengan system sekolah. Oleh pimpina-pimpinan Islam, system ini direspon positif dengan memperkenalkan system klasikal dengan nama madrasa, namun perkembangan ini tidak banyak mempengaruhi eksistensi pondok pesantren meskipun ada sebagian pondok pesantren memasukkan unsur-unsur pendidikan umum kedalam kurikulum pondok pesantren.

---

<sup>1</sup> M. Sulton Masyhud, *Manajemen Pondok Pesantren* (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 1.

<sup>2</sup> Ibid.,2.

Cukup banyaknya pondok pesantren dengan berbagai corak, system dan modelnya telah menjadi acuan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dalam upaya merealisasikan pendidikan untuk semua (*Education For All*). Pondok pesantren yang menyebar di pedesaan (sekitar 8.829 atau 78,05%),<sup>3</sup> harus lebih dioptimalkan dan diefektifkan dalam gerakan atau program pemberantasan buta huruf dan program wajib belajar Pendidikan Dasar.

Sejalan dengan kecenderungan deregulasi bidang pendidikan, penyetaraan pendidikan juga di arahkan kepada pondok pesantren. Untuk itu pondok pesantren salafiyah yang merupakan salah satu tipe pondok pesantren telah memperoleh penyetaraan melalui SKB dua materi (Menag dan Mendiknas) No. I/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tertanggal 30 Maret 2000. SKB ini memberikan kesempatan kepada pesantren salafiyah untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sehingga upaya pemererat pelaksanaan program wajib belajar dengan persyaratan penambahan mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dalam kurikulumnya. Pesantren tipe ini masuk dalam kategori pendidikan non formal (*Non Formal Education*).<sup>4</sup>

Hal ini dilakukan pemerintah (Depag) karena sebagai departemen teknis yang memiliki kewenangan dan tugas dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, memiliki tanggung jawab yang penuh baik langsung maupun terhadap eksistensi pondok pesantren terutama dalam menghadapi perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi karena dimasa depan yang penuh tantangan, dibutuhkan SDM yang berkualitas, bermoral, dengan standar minimal berpendidikan dasar.

## **B. Pesantren Sebagai Fondasi Dasar Pendidikan Islam; Tinjauan Historis**

Istilah “pondok pesantren” tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pondok pesantren. Setidaknya ada 5 (lima) ciri yang terdapat

---

<sup>3</sup>Ibid., 4.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah* (Jakarta: DEPAG RI, 2003), 1.

dalam suatu lembaga pondok pesantren: kiai, santri, pengajian, asrama, dan, masjid atau mushalla dengan aktivitasnya. Sehingga bila dirangkum semua unsur-unsur tersebut dapatlah dibuat suatu pengertian pondok pesantren.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Pada sebagian pondok pesantren, sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang semakin lama semakin berubah, karena dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan di Indonesia serta tuntunan dari masyarakat di lingkungan pondok pesantren sendiri. Sebagian lagi mempertahankan sistem pendidikan dan pengajarannya yang semula. Karena yang terpenting adalah terselenggaranya pengajian pondok pesantren sebagai satu ciri utama penyelenggaraan pondok pesantren.<sup>6</sup>

Pondok pesantren, menurut sejarah akar berdirinya di Indonesia, ditemukan dua versi pendapat. *Pertama*, pendapat yang menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fatwa bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat disebut kiai, yang mewajibkan pengikutnya melaksanakan suluk selama 40 hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama sesama anggota tarekat dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama sesama anggota tarekat dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah dibawah bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat dikiri kanan masjid. Di samping mengerjakan tarekat para pengikut itu juga di ajarkan kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pondok pesantren.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren* (Jakarta: DEPAG RI, 2003), 40.

<sup>6</sup>Ibid., 41.

*Kedua*, pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambilalihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini di dasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok pesantren telah ada di negeri ini. Pendirian pondok pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu. Fakta lain menunjukkan bahwa pondok pesantren bukan berasal dari tradisi Islam adalah tidak ditemukannya lembaga pondok pesantren di Negara-negara Islam lainnya.<sup>7</sup>

Dalam sejarahnya, pesantren lahir bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Dalam perspektif M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam, di samping sebagai sebuah lembaga pendidikan.<sup>8</sup> Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan yang ada pada pertengahan abad ke 20 di Indonesia. Sistem pendidikan pesantren disediakan untuk para muslim pribumi yang memfokuskan pengajarannya pada ilmu agama.<sup>9</sup> Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika. Ini terjadi lantaran proses perubahan di dalam dan di luar pesantren.

Mulanya, pesantren difungsikan sebagai pembangunan komunitas desa dan masyarakat pinggiran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sampai menjadi model pendidikan alternatif. Konteks sosiologis pesantren tersebut merupakan hasil dari proyeksi masyarakat pesantren sendiri, pemerintah dan masyarakat umum yang memerankan pesantren dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>10</sup>

Dalam perspektif lain, pesantren mulai dikenal sejak pertama kali lembaga itu didirikan, untuk mengetahui sejarah pesantren. Ada beberapa pendapat yang umum berlaku. Di antaranya disebutkan pertama kali pesantren didirikan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada awal abad ke-17

---

<sup>7</sup>Ibid., 10-11.

<sup>8</sup> M. Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), VII.

<sup>9</sup> Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 22.

<sup>10</sup> Zaini Tamin Abd. Rohim, "Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)" *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies*, Vol. 3, No. 2 (November 2015), 325.

(tahun 1619 M). Namun bagaimanapun asal mula terbentuknya, pondok pesantren tetap menjadi pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia, yang perkembangannya berasal dari masyarakat yang melingkupinya. Seperti telah diungkap diatas, lembaga-lembaga pondok pesantren yang tersebar hamper diseluruh wilayah Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang. Meskipun sulit diketahui kapan permulaan munculnya, namun banyak dugaan yang mengatakan bahwa lembaga pondok pesantren mulai berkembang tidak lama setelah masyarakat Islam terbentuk di Indonesia.<sup>11</sup>

Hal yang tetap sama adalah isi pengajarannya yang diberikan melalui pengajaran kitab-kitab kuning. Namun, persoalan-persoalan masyarakat (sosial), ekonomi, dan bahkan politik ikut menjadi perhatian para pelajar saat itu. Maka tidak mengherankan jika masa sekarang peranan pondok pesantren merambah kearah pemberdayaan ekonomi, karena memang pada dasarnya telah melembaga sejak dahulu. Pondok pesantren lahir sebagai perwujudan dari dua keinginan yang bertemu. Keinginan orang yang ingin menimba ilmu sebagai bekal hidup (santri) dan keinginan orang secara ikhlas mengajarkan ilmu dan pengalamannya kepada umat (kiai). Sehingga secara fisik penggambaran pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang memadukan dua keinginan tersebut. Adapun tempatnya dapat berupa langgar, mushalla atau masjid, yang berkembang berdasarkan bertambahnya santri yang menuntut ilmu. Tempat ini pula kemudian aktivitas santri diselenggarakan.

Komunitas santri yang mengalami pertumbuhan ini pun pada awalnya merupakan santri kalon (tanpa menginap). Karena pertambahan yang semakin meningkat dan mereka tidak saja berasal dari satu daerah saja. Melainkan dari berbagai daerah, bahkan dari tempat yang sangat jauh (ini kharismatis dan ilmu kiai yang menyebar dari mulut ke mulut), maka para santri mulai di tempatkan pada tempat yang khusus. Mulanya mereka ditempatkan di beberapa bagian masjid. Lalu secara bergotong royong mereka mereka membuat rumah-rumah

---

<sup>11</sup>Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui perdangan internasional yang pusatnya dalam kota-kota pelabuhan, maka masyarakat Islam di Indonesia pada permulaanya adalah masyarakat kota. Pembentukan masyarakat kota ini, tentunya mempengaruhi pula pembentukan lembaga pendidikan yang kebetulan belum eksis. Sehingga kota-kota itu menjadi pusat-pusat studi Islam yang dikembangkan oleh para ulama yang berada disana.

bilik yang selanjutnya disebut pondok (bahasa Arab: *furuk*, yang berarti tempat menginap). Selanjutnya terbentuklah sebuah lembaga yang dikenal sebagai pondok pesantren.<sup>12</sup> Sehingga pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat dimana para santri menginap dan menuntut ilmu agama. Dalam perkembangan selanjutnya, pondok-pondok yang menyebar di seluruh Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, bergantung kepada keahlian dasar sang kiai atau guru. Banyak penamaan lain yang diberikan masyarakat yang memiliki makna sama dengan pondok pesantren, seperti surau, dayah, atau cukup dengan pondok atau pesantren saja.

Dengan keadaannya yang seperti tersebut di atas, pondok pesantren telah mencirikan dirinya sebagai sebuah lingkungan pendidikan yang integral. Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan system pendidikan sekolah di Indonesia yang sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, pondok pesantren mempunyai kultur budaya yang unik. Karena keunikannya, pondok pesantren di golongan sebagai subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia.

Menurut tradisi pondok pesantren (dahulu), pengetahuan seseorang diukur dengan jumlah buku-buku (kitab) yang pernah dipelajarinya dan kepada “kiai” mana saja ia telah berguru. Jumlah buku-buku (kitab) standar dalam tulisan arab yang dikarang ilmuan muslim Timur Tengah pada abad pertengahan yang harus dibaca ditentukan oleh pondok pesantren. Kemudian masing-masing mereka setelah itu mengembangkan diri untuk memiliki keahlian dalam cabang pengetahuan tertentu.

Selanjutnya, pertumbuhan pondok pesantren di seluruh Indonesia berlangsung dengan cepat. Ini dimungkinkan tersebar karena pada peserta didik atau santri tersebut dianggap telah mampu menguasai ilmu yang telah diberikan kiai, kembali ke daerah masing-masing dan mendirikan pondok pesantrennya dengan pengembangan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan terus berlangsung demikian. Bahkan tahun-tahun perjuangan kemerdekaan, peran

---

<sup>12</sup>Kata “pesantren” merupakan bentukan dari kata santri yang mendapat affiks “pe-an” menjadi “pesantrian”. Ada yang mengungkapkan, kata santri sendiri berasal dari kata “chantrik” yang berarti orang yang sedang belajar kepada seorang guru. Lihat Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 10.

pondok pesantren cukup besar. Mobilisasi umat dilakukan para kiai untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah.<sup>13</sup>

Pada masa penjajahan inilah, pondok pesantren mengalami tekanan yang amat berat. Pondok pesantren memang memberikan pengajaran tentang cinta tanah air dan menanamkan sikap patriotik terhadap para santrinya.<sup>14</sup>Karena meskipun pada dasarnya hanyab merupakan lembaga pendidikan keagamaan, namun lembaga ini mengutamakan dalam pendidikan itu pembinaan mental dan spriritual para santrinya. Hal ini menjadi suatu kekhawatiran penjajah.

Untuk menanggulangi hal yang demikian, pemerintah Hindia Belanda kemudian menawarkan bentuk pendidikan yang modern dalam performa sekolah. Sekolah-sekolah Hindia Belanda kemudian berkembang menyaingi keberadaan pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini lebih bersifat pendidikan yang berorientasi kepada kerja. Dalam arti para lulusannya memperoleh kerja melalui ijazah yang diberikan oleh sekolah itu. Untuk mengimbangi hal yang demikian, beberapa cendekiawan muslim pada saat itu, mencoba mendirikan sekolah yang lebih berciri khas keIslaman (madrasah). Mulailah pengajaran agama Islam diperkenankan melalui sistem sekolah modern.<sup>15</sup>

Perkembangan lain mengenai pondok pesantren adalah pada saat tumbuhnya organisasi keagamaan yang berbasiskan pada masyarakat luas. Hal ini amat berarti pada perkembangann pondok pesantren selanjutnya dikarenakan penyebaran organisasi tersebut yang mendukung eksistensi pondok pesantrennya. Bahkan dapat dikatakan, bahwa penyebaran organisasi tersebut sukses dengan dengan memberikan kepercayaan yang penuh pada pondok pesantren untuk mempopori penyebaran fahamnya. Namun tidak semua pondok pesantren bernaung dibawah panji-panji suatu organisasi massa keagamaan tertentu. Bahkan lebih banyak pondok pesantren yang bersifat independent dalam arti afiliasi, bukan dalam pengelolaan.

Perlu diketahui, bahwa dewasa ini berdirinya pondok pesantren tidak seperti pola di atas saja. Pola atau awal mula pembentukan pondok pesantren di

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 13.

<sup>14</sup>Lihat Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*(Surabaya: Khalista, 2007).

<sup>15</sup>M. Marsyud dan Moh. Khusnurdila, *Manajemen Pondok Pesantren*(Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 3.

atas memang yang lazim terjadi. Yaitu seperti pendirian pondok pesantren dari adanya pondok pesantren. Namun, fenomena baru yang terjadi dalam kaitan berdirinya suatu pondok pesantren diantaranya adalah:

*Pertama*, pondok pesantren yang berasal dari sekolah atau madrasah. Fenomena ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sekolah umum atau madrasah yang bergerak dalam bidang pendidikan formal, karena ingiun mencetak dan menghasilkan lulusan menguasai secara komprehensif ilmu-ilmu yang diberikan, maka bagi para siswanya dibuatkan suatu asrama khusus dan lingkungan tersendiri yang menjadikan mereka selalu hidup dalam lingkungan sekolah atau madrasah. Kemudian, untuk mengisi waktu-waktu luang yang ada dilakukanlah pengjian-pengajian keagamaan. Selanjutnya, bentuk sekolah atau madrasah tersebut berubah seperti pondok pesantren, dikarenakan pengajiannya berkembang, tidak membaca al-Qur'an, diskusi atau ceramah saja, melainkan juga ada pengajian kitab klasik dan penjenjangan pengajiannya. Adapun yang berperan sebagai kiai adalah kepala sekolah atau madrasah, atau suatu dewan guru mengaji yang berperan sebagai kiai secara kolektif. Mereka bahkan merubah institusi sekolah atau madrasah mereka menjadi satu pondok pesantren. Memang, meski di antaranya menyelenggarakan kegiatan pengajian dan pendidikan formal, namun ada kalanya mereka tetap menggunakan istilah teknisnya dengan sekolah atau madrasah.

*Kedua*, pondok pesantren yang berdirinya merupakan suatu paket langsung yang lengkap dan integral. Adanya keinginan untuk membantu penyiaran agama, *tafaqqub fi al-din*, dan menyukseskan tujuan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang patut di hargai. Termasuk dalam upaya pendirian sebuah pondok pesantren, yang jika menurut pola di atas mungkiun memakan waktu yang lama. Sebagaimana pada sekolah atau madrasah, untuk upaya pendirian itu, dibuatlah gedung atau bangunan masjid, rumah kiai, rumah dewan guru, gedung asrama, gedung ruangan belajar, aula, ruangan keterampilan dan lapangan olahraga secara integral dalam suatu kompleks yang kondusif untuk pendidikan. Termasuk kegiatan ini pengadaan kitab-kitab, bahan

pembelajaran bahkan guru-guru atau ustadnya. Setelah seluruhnya siap, maka rekrutmen para santri dimulai.<sup>16</sup>

*Ketiga*, pondok pesantren yang didirikan oleh komunitas homogeny yang berkepentingan untuk menjaga kesinambungan keilmuan yang mereka miliki dan meningkatkan wawasannya.<sup>17</sup> Pengajian biasa dari sebuah komunitas homogen yang sering melakukan halaqah dan diskusi keagamaan, dan bahkan mengkaji kitab-kitab *qadimah* dan *ashriyyah* yang selanjutnya melembaga untuk kalangan mereka. Kemudian dipilihlah di kalangan mereka, salah seorang yang memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pimpinan.

### C. Tipologi Pesantren; Dari Salafiyah hingga Khalafiyah

Dalam pelaksanaannya sekraing ini, dari sekian banyak system atau tipe pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, secara garis besar dapat digolongkan kedalam dua bentuk yang penting.<sup>18</sup> *Pertama*, Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam yang kegiatan pendidikan dan pengajarannya sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran (pendidikan dan pengajaran) yang ada pada pondok pesantren ini dapat diselenggarakan dengan cara non klasifikasi atau dengan klasikal. Jenis pondok pesantren ini pun dapat meningkatkan dengan membuat kurikulum sendiri, dalam arti kurikulum ala pondok pesantren yang bersangkutan yang disusun berdasarkan cirri khas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Penjenjangan dilakukan dengan cara memberikan kitab pegangan yang lebih tinggi dengan funun (tema kitab) yang sama, setelah tamatnya suatu kitab. Para santri dapat tinggal dalam asrama yang disediakan dalam lingkungan pondok pesantren (santri *kalong*).

*Kedua*, Pondok Pesantren Khalafiyah. Pondok khalafiyah adalah pondok pesantren yang selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan, juga

---

<sup>16</sup>Penamaan lembaga ini memang langsung sebagai pondok pesantren dan bukan dari sejarah pendirinya. Sehingga, dalam situasi tertentu tidak membaaur dengan masyarakat sekitar dan pondok pesantren terpisah dari akarnya di masyarakat.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 15-16.

<sup>18</sup>Fadeli dan Subhan, *Antologi NU*, 113.

menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal (jalur sekolah), baik itu jalur sekolah umum (SD, SMP, SMU, dan SMK), maupun jalur sekolah berciri khas agama Islam (MI, Mts, MA, dan MAK). Biasanya kegiatan pembelajaran kepesantrenan pada pondok pesantren yang klasikal dan berjenjang dan bahkan sebagian kecil pondok pesantren pendidikan formal yang diselenggarakannya berdasarkan pada kurikulum mandiri, bahkan dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama. Pondok pesantren itu dapat mungkin dapat pula dikatakan sebagai pondok pesantren salafiah plus. Pondok pesantren salafiah yang menambah lembaga pendidikan formal dalam pendidikannya dan pengajarannya.

Penjenjangan dapat dilakukan berdasarkan pada sekolah formalnya, atau berdasarkan pengajiannya (seperti pada pondok pesantren salafiyah). Para santri yang ada pada pondok pesantren tersebut pun adakalanya “mondok” dalam arti sebagai santri dan sebagai siswa sekolah. Adakalanya pula sebagian siswa lembaga sekolah-sekolahbukan santri pondok pesantren, hanya ikut pada lembaga formal saja. Bahkan dapat pula santrinya hanya mengikuti pendidikan kepesantrenan saja. Dalam bentuk atau tipe pondok pesantren ini, bentuk pengembangan lain, atau keterampilan, dan kegiatan keagamaan dan sosial dapat diselenggarakan. Misalnya dalam pembentukan unit usaha, penyelenggaraan agribisnis, penyelenggaraan program keterampilan atau program pengembangan potensi lainnya, penyelenggaraan program keterampilan atau program pengembangan potensi lainnya. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan panti asuhan dan anak jalanan, serta pelaksanaan sekolah (madrasah) luar biasa dipondok pesantren dengan tipe-tipe SLBnya.<sup>19</sup>

Dua bentuk di atas adalah bentuk yang paling populer, meski terdapat pembentukan lain, seperti pondok pesantren tipe A, B, C dan C, seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya. Untuk memudahkan pengertian, kedua bentuk pondok pesantren ini di definisikan (a) Pondok Pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan pengajian kitab dan pengajaran agama Islam, dan (b) pondok pesantren khalafiyah adalah pondok

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 11.

pesantren yang selain menyelenggarakan pengajian kitab dan pengajaran agama Islam, juga menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah atau formal. Pondok pesantren kedua ini dapat dikatakan juga sebagai pondok pesantren salafiyah plus. Karena, sebagian pondok pesantren tidak ingin disebut sebagai pondok pesantren khalafiyah.

Selanjutnya banyak format baru pondok pesantren yang diselenggarakan lembaga pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan kondisinya. Namun format-format baru yang muncul pada dasarnya merupakan pengembangan dari dua model pondok pesantren seperti tersebut di atas. Hal terpenting adalah terpeliharanya cirri-ciri yang ditampilkan oleh suatu pondok pesantren seperti yang telah di ungkap di atas.

Adapun penyelenggaraan pondok pesantren diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola atau pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang bersangkutan. Kemerdekaan pondok pesantren tidak akan terintervensi, meskipun telah mendirikan lembaga pendidikan formal yang berstatus negeri. Kesederhanaan tetap menjadi ciri khas yang menonjol. Ukhuwah Islamiyah juga menjadi pegangan hidup bersama dengan masyarakat sekitar.

Sehingga pada pokoknya, pondok pesantren dengan berbagai bentuk atau tipe atau pola penyelenggaraannya tetap sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang memadukan tiga unsur pendidikan yang sangat penting, yaitu peningkatan keimanan dengan ibadah, penyebaran dan ajaran agama Islam dengan tabligh, dan memberdayakan potensi umat dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan yang baik dengan amal soleh.

Menyadari bahwa pondok pesantren telah mengalami bentuk dari keadaan semula, pada tahun 1979, Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 3 Tahun 1979 yang mengungkapkan bentuk pondok pesantren.<sup>20</sup> *Pertama*, pondok pesantren tipe A, pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajarannya yang berlangsung secara tradisional (wetonan atau sorogan. *Kedua*, Pondok Pesantren

---

<sup>20</sup>Ibid.

Tipe B , yaitu tipe pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kiai bersifat aplikasi dan diberikan pada waktu-waktu tertentu. Para santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.

*Ketiga*, pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren yang hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar diluar (madrasah atau sekolah umum) dan kiainya hanya merupakan pengawas dan Pembina mental para santri tersebut; dan *Keempat*, pondok pesantren tipe D , yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Bentuk pondok pesantren seperti yang diungkapkan di atas merupakan upaya pemerintah dalam memberikan batasan atau pemahaman yang lebih mengarah kepada bentuk pondok pesantren, meskipun demikian, sesungguhnya perkembangan pondok pesantren tidak terbatas pada empat bentuk tadi, namun dapat lebih beragam banyaknya. Bahkan dari tipe yang sama pun terdapat perbedaan tertentu yang menjadikan satu sama lain tidak sama.

Dalam upaya mengakomodasi hal demikian, berbagai bentuk pondok pesantren yang muncul di antaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab klasik (salafiyah), sebagaimana pengertian umum yang telah diungkap di atas. Para santri dapat diasramakan, kadangkala tidak diasramakan. Mereka yang tidak diasramakan tinggal di masjid dan rumah-rumah seperti yang berada disekitar masjid atau rumah kiai.
2. Pondok pesantren seperti yang telah diungkap sebelumnya, namun memberikan tambahan latihan keterampilan atau kegiatan kepada para santri pada bidang-bidang tertentu dalam upaya penguasaan keterampilan individu atau kelompok. Termasuk dalam kategori ini adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan potensi umat.
3. Pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab dan umum lebih mengarah pada upaya pengembangan tarekat/sufisme, namun

---

<sup>21</sup>Perlu penjelasan di sini, bahwa apapun bentuk dan tipe sebuah pondok pesantren, ia dapat dikatakan sebagai pondok pesantren jika terpenuhinya sekurang-kurangnya ciri-ciri yang telah disebut di atas. Lihat Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 26.

para santrinya ada kalanya ada yang di asramakan, adakalanya pula tidak diasramakan.

4. Pondok pesantren yang hanya menyelenggarakan kegiatan keterampilan khusus agama Islam, kegiatan keagamaan, seperti tahfidz (hafalan) Al-Qur'an dan majelis taklim, seperti halnya dengan yang tersebut sebelumnya, adakalanya santri diasramakan, ada kalanya tidak.
5. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab klasik, namun juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan pendidikan formal kedalam lingkungan pondok pesantren. Siswa pada lembaga pendidikan formal ada yang tidak tinggal di asramakan bukan termasuk kategori santri (tidak ikut pengajian). Ada kalanya hanya ada santri yang hanya ikut pengajian saja dan tidak tinggal diasrama
6. Pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran pada orang-orang menyandang masalah sosial. Patut dicatat bahwa dalam rangka pemerataan yang layak, maka diupayakan adanya penyelenggaraan pondok pesantren yang memberikan bentuk pengajaran khusus mereka yang memiliki cacat tubuh atau keterbelakangan mental dalam penyelenggaraan Madrasah luar biasa di pondok pesantren, dan juga bagi mereka yang yatim atau anak jalanan dalam sebuah panti asuhan yang dikelola sebagai pondok pesantren.
7. Pondok pesantren yang merupakan kombinasi dari beberapa poin atau seluruh poin yang tersebut di atas (konvergensi).

#### **D. Pondok Pesantren Salafiyah; Fungsi, Prinsip dan Relevansi**

Dari waktu ke waktu fungsi pesantren berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global. Betapa tidak, pada awalnya lembaga tradisional ini mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Di antara fungsi pesantren salafiyah, yaitu (1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, (2) pemeliharaan ilmu Islam dan, (3) reproduksi ulama.

Dalam perjalanannya sehingga sekarang, sebagai lembaga sosial, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan formal berupa sekolah umum maupun madrasah ( madrasah, sekolah umum dan sekolah tinggi). Di

sampingitu, pesantren juga menyelenggarakan pendidikan non formal berupa madrasah diniyah yang mengajarkan bidang-bidang ilmu agama saja. Pesantren juga telah mengembangkan fungsinya sebagai lembaga solidaritas sosial dengan menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan member pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi mereka.

Bahkan melihat kinerja dan kharsima kiainya, pesantren cukup efektif untuk berperan sebagai lembaga solidaritas lembaga sosial yang menampung anak-anak dari segala lapisan masyarakat muslim dan member pelayanan yang sama kepada mereka, tanpa mebedakan tingkat sosial ekonomi mereka. Bahkan melihat kinerja dan kharisma kiainya, pesantren cukup efektif untuk berperan sebagai perekat hubungan dan pengayom masyarakat, baik pada tingkatan lokal, regional dan nasional.

Pada tataran lokal, arus kedatangan tamu kepada kiai sangat besar, dimana masing-masing tamu dengan niat yang berbeda-beda. Ada yang ingin bersilaturahmi, ada pula yang berkonsultasi, meminta nasehat, memohon do'a, berobat dan ada pula yang ingin minta jimat untuk sugesti penanggal gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Para kiai juga sering memimpin majelis taklim, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pengundang yang otomatis dapat memberikan pembelajaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat di atas nilai-nilai hakiki (kebenaran Al-Qur'an dan hadits) dan asasi dengan berbagai bentuk, baik melalui ceramah umum atau dialog interaktif. Oleh karenanya, tidak diruguka lagi kiai dapat memainkan peran sebagai kultural (pialang budaya) dengan menyampaikan pesan-pesan pembangunan dalam dakwah-dakwahnya, baik secara lisan dan tindakan (*bil hal, uswah hasanah*).

Dengan berbagai peran potensial dimainkan oleh pesantren di atas, dapat dikemukakan bahwa pesantren memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan masyarakat sekitarnya, sekaligus menjadi rujukan moral (*reference of morality*) bagi kehidupan masyarakat umum.<sup>22</sup> Fungsi-fungsi ini kan tetap

---

<sup>22</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2001), 113.

terpelihara dan efektif menakal para kiai pesantren dapat menjaga independensinya dari intervensi “dari luar”.

Dalam buku *Manajemen Pondok Pesantren*, menjelaskan setidaknya ada dua belas prinsip yang melekat pada pendidikan pesantren salafiyah, yaitu: (1) teosentrik, (2) ikhlas dalam pengabdian, (3) kearifan (4) kesederhanaan, (5) kolektifitas (beraktual Jama'ah), (6) mengatur kegiatan bersama, (7) kebebasan terpimpin, (8) kemandirian (9) tempat menuntut ilmu dan mengabdikan (thalabul ilmi lil ibadah), (10) mengamalkan ajaran agama, (11) belajar dipesantren untuk mencari sertifikat/ijazah saja, (12) kepatuhan terhadap kiai.<sup>23</sup> Melihat prinsip-prinsip yang khas di atas, tidak tepat kiranya jika ada orang yang menilai pesantren dengan tolak ukur atau kaca mata non pesantren. Misalnya, dalam prestasi akademik, pesantren selalu identik dengan nilai-nilai moral dan etik. Kualitas prestasi santri sering diukur dengan tolak ukur akademik dan kuantitatif (kualitatif), bukan indikator-indikator kuantitatif.

Dengan menyandarkan diri kepada Allah SWT, para kiai pesantren memulai pendidikan pesantrennya dengan niat modal ikhlas dakwah untuk menegakkan kalimat-Nya, didukung dengan prasarana sederhana dan terbatas. Inilah ciri pesantren, tidak tergantung pada sponsor, dalam melaksanakan visi dan misinya. Memang sering kita jumpai dalam jumlah kecil pesantren tradisional dengan sarana dan prasarana megah, namun para kiai dan santrinya tetap mencerminkan perilaku-perilaku kesederhanaan. Akan tetapi sebagian besar pesantren tradisional tampil dengan sarana dan prasarana ini, ternyata tidak menyurutkan para kiai dan santri untuk melaksanakan program-program pesantren yang telah dicanangkan. Mereka seakan sepakat bahwasanya pesantren adalah tempat untuk melatih diri (*riyadlah*) dengan penuh keprihatinan.

Relevan dengan jiwa kesederhanaan di atas, maka tujuan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, menyebarkan agama atau menegakkan agama Islam dan kejayaan

---

<sup>23</sup>Masyhud, *Manajemen Pondok Pesantren*, 77.

umat Islam ditengah-tengah masyarakat (*iznul Islam wal muslimin*), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.

#### **E. Program Wajib Belajar dan Pesantren Salafiyah; Tinjauan Epistemologis**

Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.<sup>24</sup> Melihat dari konsep wajib Belajar Departemen Agama menurut penulis atau peneliti masih dirasa ada kekurangseriusan, ini terbukti dengan bahwa program wajib belajar adalah bersifat gerakan, meskipun gerakan ini telah termaktub dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Menurut konsep ini pula dianjurkan untuk tamat dan ada kesempatan bagi masyarakat dalam hal ini pondok pesantren untuk bisa menyelenggarakan. Ini wajib belajar merupakan gerakan yang setengah-setengah. Dan memang dalam tataran pelaksanaannya Departemen Agama dalam hal ini Seksi Pendidikan dalam Hal ini seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren ) belum mampu menerapkan sistem yang memang telah baku tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Sebab beberapa hal baik yang bersifat administratif atau yang bersifat kondisional di beberapa pondok pesantren di Indonesia, yang melaksanakan program ini seperti kesiapan pondok pesantren dalam melaksanakann program ini. Dalam sudut pandang teologis, substansi dari takwa adalah menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah kecuali dengan belajar. Disamping itu banyak sekali anugerah bagi orang yang mau bersusah payah untuk mencari ilmu.

Karena demikian besarnya balasan bagi orang yang mencari ilmu sehingga Imam Al-Ghazali berpendapat.<sup>25</sup> Karena ilmu dapat menghidupkan hati dari kebutaan dan cahaya jiwa dalam kegelapan serta kekuatan badan dari kelemahan sehingga bisa menghantarkan orang yang mencari ilmu ke pangkat

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*, 7.

<sup>25</sup> Al- Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* Juz 1 (Kairo: Dar al Ulu>m, tt), 12.

yang lebih mulia juga hanya dengan bertafakkur akan pentingnya ilmu pahalanya bisa menyamai pahalanya orang yang berpuasa.

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintra merupakan salah satu usaha untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan.<sup>26</sup> Pemerataan pendidikan atau dalam istilah lain disebut dengan keadilan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sulit untuk bisa dilaksanakan mengingat keberagaman sosial budaya, kultur, letak geografis, dan keberagaman yang lain yang sangat kompleks. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak ada usaha. Namun masih perlun untuk menyamakan persepsi antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga prosedur penyelenggaraan, kurikulum, dan system evaluasinya, lebih terarah. Mengingat begitu pentingnya pemerataan pendidikan sehingga Rasulullah SAW mengirm Sayyidina Muadz ke Yaman untuk menjadi dua ilmu seraya nabi bersabda:

من تعلم بابا من العلم ليعلم الناس اعطى ثواب سبعين صد يقا (رواه ابو منصور الد يلمي)

“Barang siapa belajar ilmu untuk diajarkan pada manusia maka akan diberi pahala tujuh puluh para shiddiqin.<sup>27</sup>

Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga dan perilaku. Pengembangan aspek tersebut bermuara melalui peningkatan dan pengembangan dan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil diamsa dating. Dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara tertahap dan berkesinambungan.

Kecakapan hidup (*life skill*) yang ingin di integrasikan kedalam pembelajaran dan menejemen program wajardikdas belum sepenuhnya dipahami dengan baik karena ketika yang disinggung adalah *life skill* maka anggapan kita adalah vokasional, padahal masih ada kecakapan hidup yang lain :

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, 72.

<sup>27</sup>Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Ijuz* II (Kairo: Da>r al Ulu>m, tt), 11.

pribadi, sosial, akademik, emosional dan spiritual. Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan sering kali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan kebanyakan program pendidikan yang hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ), padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun kariernya *mandeg*. Atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibatnya rendahnya kecerdasan hati mereka.

Seperti yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an adalah membina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan Khalifah-Nya. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsure-unsur material (jasmani) dan immaterial (akal dan jiwa). Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwidimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Itu sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah *adab al-din* dan *adab al-dunya*. Pembinaan manusia, atau dengan kata lain pendidikan Al-Qur'an terhadap anak didiknya dilakukan secara bersamaan. Salah satu contoh ialah sikap Al-Qur'an ketika menggambarkan puncak kesucian jiwa yang dikenal oleh seorang nabi pada saat menerima wahyu.

Program wajib belajar pendidikan dasar terutama di pondok pesantren salafiyah merupakan salah satu jalan alternatif agar para santri dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Meski sebagian lingkungan pondok pesantren dewasa ini telah membuka jalur pendidikan sekolah (formal), baik itu sekolah umum maupun madrasah, dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Namun masih banyak pula pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan jalur pendidikan

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*, 7.

sekolah. Pondok pesantren yang menenkankan pada pendalaman ilmu-ilmu agama saja. Dalam al-Qur'an disebutkan:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم  
لعلهم يهتدون

“Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk member peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122).<sup>29</sup>

Dan sumber atau rujukan beberapa kitab-kitab klasik berbahasa Arab, sehingga dapat dikatakan bahwa para santri yang belajar di sana belum memenuhi Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Hal ini menyebabkan para lulusan yang dihasilkan pondok-pondok pesantren tersebut tidakmendapat tempat langsung dalam perjenjangan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, banyak pondok pesantren yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, yang ijazahnya diperlukan dalam melanjutkan studi para lulusannya tidak dimanfaatkan, karena formalnya mereka belum mendapat pengajaran pada pendidikan dasar.

Satuan pendidikan pondok pesantren seperti ini dimungkinkan menyelenggarakan program pendidikan dasar tersendiri yang penyetaraannya dengan pendidikan desa di akui oleh pemerintah, dalam hal ini menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Upaya untuk menumbuhkan peran pondok pesantren dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar secara melembaga dan terstandar inilah yang sedang dilaksanakan sebagai peran pondok pesantren dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.

Penyelenggaraanwajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah dan kalangan pondok pesantren dalam upaya menuntuskan program wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia. Penyelenggaraan ini merupakan upaya yang tidak mengenal lelah kalangan pondok pesantren untuk membantupelaksanaan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun

---

<sup>29</sup>DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG RI, 1971), 301.

pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren salafiyah lebih berorientasi pada masalah keagamaan namun pembentukan watak, mental dan keterampilan, serta kemandirian yang terjadi dipondok pesantren tentunya menjadi pertimbangan lain. Sehingga pada akhirnya, pemerintah sendiri yang memberikan pengakuan terhadap eksistensi pondok pesantren salafiyah sebagai pola wajib belajar dalam pendidikan dasar dengan standarisasi tertentu.

Konseptersebut merupakan hal yang paling vital agar sesuai dengan tujuan dari rencana pelaksanaan program ini sehingga program mulia ini bisa tepat guna, berhasil guna dan menunjang pada tujuan. Efektivitas program wajib belajar pendidikan dasar dipondok pesantren salafiyah secara umum dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: pertama, dalam tataran pelaksanaannya yang menyangkut sasaran atau objek materil, kurikulum dan sistem evaluasinya. Kedua, hal yang menjadi penghambat, antara lain: jenjang, prosedur penyelenggaraan dan proses belajar mengajarnya.

Strategis analisis data kualitatif-verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Karena, itu format strategi unit lebih awal memperoleh data sebanyak-banyaknya dilapangan, dengan mengesampingkan peran teori (sebagaimana dasar deskriptif-kualitatif menggunakan sebagai alat utama analisis) meskipun demikian, teori bukanlah suatu yang tidak penting dalam format ini. Dengan kata lain peneliti bukan seseorang yang buta, atau pura-pura buta terhadap teori, namun peran data lebih penting dari teori itu sendiri.<sup>30</sup> Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan atas data-data yang diperoleh dari serentetan proses penelitian dengan metode induktif tentang wajib belajar pendidikan dasar di lingkungan pesantren salafiyah.

---

<sup>30</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 147.

## **F. Urgensi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah**

Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren salafiyah dilaksanakan pada pagi hari yaitu jam 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB setiap hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Tiap hari dua jam mata pelajaran semua enam mata pelajaran dilaksanakan dengan tatap muka. Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren salafiyah terbagi dua jenjang yaitu *Ula* dan *Wustha*.

Tahun ajaran baru direncanakan setiap tahun pada akhir sanah yaitu pada bulan Sya'ban dan perencanaan tersebut menyangkut tenaga kependidikan, anggaran pembiayaan penerimaan santri baru, proses belajar mengajar dan penilaian hasil belajar. Perencanaan tersebut direalisasikan pada bulan Syawal berikutnya, tenaga kependidikan baik yang menyangkut pengurus Wajib Belajar Pendidikan Dasar, tutor dan tenaga terkait lainnya biasanya lebih diutamakan dari ustadz Pondok Pesantren salafiyah dengan berbagai pertimbangan dalam koordinasi. Honor bisa disesuaikan dengan kondisi anggaran Pondok Pesantren salafiyah dan tingkat dedikasi lebih terbukti walapun tingkat pendidikannya masih banyak yang belum mencapai kualifikasi.

Anggaran pembiayaan di Pondok Pesantren salafiyah satu-satunya bersumber dari BOS karena tidak ada alokasi anggaran Pondok Pesantren salafiyah untuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan santri dibebaskan dari segala pembiayaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. BOS tersebut terlebih dahulu harus dimasukkan kedalam kas umum Pondok pesantren salafiyah baru kemudian setelah proses pembelajaran berjalan selama tiga bulan bisa dicairkan untuk pembiayaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Penerimaan santri baru sebetulnya tidak hanya pada bulan Syawal saja, tetapi masih ada juga santri yang mendaftarkan diri setelah pelaksanaan UAN beberapa bulan sebelumnya dan bahkan selama pengajuan BOS belum dilaksanakan ataupun setelah dilaksanakan pengurus masih bisa menerima santri baru asal sebelum verifikasi pengajuan beserta UAN tahun berikutnya. Sedangkan proses belajar mengajar sepenuhnya menjadi tanggung jawab otoritas tutor yang tidak membuat RPP dan silabus dikarenakan ketidaktahuan para tutor dengan sistem kurikulum terbaru atau tidak sempatnya tutor dengan kesibukan-

kesibukan yang lain yang sering rangkap jabatan. Dan penilaian hasil belajar atau evaluasi yang tidak memadai serta kurang terprogram maka penilaian hasil belajar hanya bisa dilihat dari hasil UAN dan perorangan.

Dalam implementasinya, wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah ada beberapa hal yang harus diperhatikan: *Pertama*, tenaga kependidikan, baik pengurus, tutor, tata usaha, pustakawan, dan lain-lain. Meskipun dedikasinya tinggi tetapi kwalifikasinya sangat rendah, sedangkan tutor yang dari luar Pondok Pesantren Salafiyah yang semuanya telah berkualifikasi Sl (Sarjana) tetapi para tutor tersebut juga mempunyai banyak aktivitas lainnya.

*Kedua*, anggaran pembiayaan. Seharusnya BOS tersebut dialokasikan untuk pembiayaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah akan tetapi dikarenakan anggaran belanja Pondok Pesantren Salafiyah belum mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan Pondok Pesantren Salafiyah maka BOS juga digunakan untuk membiayai pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah. *Ketiga*, penerimaan santri baru santri ikut Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah setelah UAN, bulan Syawal dan kapan saja sebelum pengajuan peserta UAN tahun ajaran berikutnya menjadi tujuan instruksional tidak tepat sasaran, tepat guna dan tidak berhasil guna.

*Keempat*, proses belajar mengajar. Santri yang belajar pada pagi hari setiap hari Jum'at, Sabtu dan Ahad tidak bisa sepenuhnya aktif karena pada saat yang bersamaan ada santri yang juga belajar Madrasah Diniyah di kelas pagi dan santri yang madrasah diniyahnya masuk siang ini mobilitasnya sangat rendah karena padatnya jadwal di Pondok Pesantren Salafiyah Sedangkan yang umurnya telah lewat mereka merasa malu untuk ikut proses belajar mengajar.

*Kelima*, penilaian hasil belajar. Karena lemahnya sistem evaluasi yang ada sehingga motivasi santri untuk belajar juga ikut lemah. Disamping itu pengurus tidak mempunyai pedoman yang standart untuk menentukan kualitas santri. Hasil evaluasi belajar mutlak diperlukan dikarenakan: (1) Kntegritas. Suatu rancangan evaluasi hasil belajar tidak hanya menyangkut konsep-konsep, pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek kepribadian lainnya, seperti: apresiasi, sikap minat, pemikiran kritis, penyesuaian

diri, baik personal, maupun sosial; (2) Kontinuitas. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar secara kontinyu berarti ustadz/ustadzah diharapkan dapat membimbing pertumbuhan dan perkembangan. Program evaluasi Pembelajaran hendaknya merupakan rangkaian bagian dari bimbingan belajar Siswa/santri. Prinsip ini secara implisit mengharuskan ustadz/ustadzah untuk menilai tidak hanya sekali saja, melainkan berkesinambungan selama dalam proses pembelajaran; (3) Obyektivitas. Artinya, hasil dari evaluasi harus dapat ditafsirkan dengan jelas dan tegas. Dengan demikian dari hasil evaluasi tersebut dapat digambarkan secara jelas keadaan siswa/santri dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, dan posisinya di antara siswa/santri-siswa/santri lainnya. Di akhir sanah biasanya ada Rapat Evaluasi Program Pondok Pesantren Salafiyah secara keseluruhan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar, tetapi evaluasi hanya bersifat laporan secara logis dan tertulis dengan sederhana sekali sehingga boleh dikatakan evaluasi dan program tidak ada evaluasi sama sekali.

## G. Kesimpulan

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah dan kalangan pondok pesantren dalam upaya menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia. Penyelenggaraan ini merupakan upaya yang tidak mengenal lelah kalangan pondok pesantren untuk membantupelaksanaan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Efektivitas program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah secara umum dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: pertama, dalam tataran pelaksanaannya yang menyangkut sasaran atau objek materil, kurikulum dan sistem evaluasinya. Kedua, hal yang menjadi penghambat, antara lain: jenjang, prosedur penyelenggaraan dan proses belajar mengajarnya.

Dalam implementasinya, wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah ada beberapa hal yang harus diperhatikan: *Pertama*, tenaga kependidikan, baik pengurus, tutor, tata usaha, pustakawan, dan lain-lain. *Kedua*, anggaran pembiayaan. BOS harus dialokasikan untuk pembiayaan wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren salafiyah karena anggaran belanja Pondok

Pesantren Salafiyah belum mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan. *Ketiga*, proses belajar mengajar harus dilaksanakan dengan menyesuaikan aktivitas belajar santri di madrasah, sehingga ada keseimbangan pemahaman terkait materi. *Keempat*, penilaian hasil belajar harus mempunyai pedoman yang standar untuk menentukan kualitas santri.

## H. Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: DEPAG RI, 1971.
- \_\_\_\_\_. *Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Jakarta: DEPAG RI, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: DEPAG RI, 2002.
- Fadeli, Soeleiman., dan Subhan, Mohammad. *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Ghazali (Al). *Ihya' Ulumuddin*. Kairo: Daar al Ulu>m, tt.
- Khuluq, Lathiful. *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Masyhud, M. Sulthon. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta; Kencana, 2007.
- Raharjo, M. Dawam (ed). *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M, 1985.
- Rohim, Zaini Tamin Abd. "Pesantren dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)". *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, Vol. 3, No. 2 (November 2015).
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2005.